

ABSTRAK

Citra Lestio Wati: Implementasi Kebijakan Perizinan Minimarket Berdasarkan Data Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 Di Kota Cimahi

Penelitian ini berangkat dari permasalahan kebijakan perizinan minimarket yang tidak sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2010, serta jumlah minimarket di Kota Cimahi yang sudah melebihi angka ideal. Jumlah minimarket di Kota Cimahi yaitu ada 139 minimarket dan hanya 66 minimarket yang memiliki izin.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perizinan minimarket di Kota Cimahi, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat saat pelaksanaan kebijakan perizinan minimarket di Kota Cimahi, serta solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut antara lain meliputi *communication* (komunikasi), *resources* (sumberdaya), *dispositions* (disposisi), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa dalam Perda No. 1 Tahun 2010 pemerintah membebaskan para pengusaha untuk membangun minimarket boleh berhimpitan ataupun bersebelahan di jalan nasional. Hal inilah yang menjadi awal penyebab pertumbuhan dan perkembangan minimarket di Kota Cimahi semakin tidak terkendali. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut pihak DPMPTSP menggunakan metode buffering dan mapping GAS, untuk memetakan minimarket yang di Kota Cimahi. Maka hasil data mapping tersebut menjadi acuan yang harus dipatuhi dan menjadi harga mati bagi para pengusaha minimarket maupun pemerintah dalam hal proses perizinan minimarket, karena dengan adanya mapping tersebut para pengusaha ataupun pihak-pihak yang terkait dalam perizinan minimarket sudah tidak bisa semena-semena lagi dalam melakukan pembangunan minimarket. Pemerintah Kota Cimahi melakukan perubahan beberapa pasal dalam Perda No.1 Tahun 2010 menjadi Perda No.8 Tahun 2016, radius jarak masih tetap berlaku, namun ditambah kebijakan baru yaitu berdasarkan kuota jumlah penduduk. yaitu 1 minimarket per-6000 jiwa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan Minimarket, Data DPMPSTP

ABSTRACT

Citra Lestio Wati: Implementation of Minimarket Licensing Policy Based on Data from the Department of Investment and Integrated Services One Door Year 2016 In Cimahi City

This study departs from minimarket licensing policy issues that are inconsistent with Regulation No.1 of 2010, as well as the number of minimarkets in Cimahi which already exceeds the ideal number. The minimarket in Cimahi City is 139 minimarkets and only 66 minimarkets are licensed.

In general, the purpose of this study is to find out how the implementation of minimarket licensing policy in Cimahi City, and what are the supporting and inhibiting factors when the implementation of minimarket licensing policy in Cimahi City, and what solutions can be done to minimize the problem.

This research uses the theory of policy implementation model according to Edward III, there are four factors that influence the success or failure of policy implementation. These factors include communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The data collected were obtained from the observation and interviews with the Department of Investment and One Stop Integrated Services, with the technique of determining the informant using purposive sampling.

Based on observations and interviews, the researchers found that in Regulation No. 1 of 2010, the government released the entrepreneurs to build minimarket be coincident or adjacent on national roads. This is the initial cause of the growth and development of the minimarket in Cimahi increasingly unmanageable. To overcome these problems the DPMPSTP using buffering and mapping GAS method, to map the minimarket in Cimahi City. The results of the data mapping has become a reference to be followed and a fixed price for the employers minimarket and government in terms of the licensing process minimarket, because with the mapping of the entrepreneurs nor the parties involved in the licensing minimarket can no arbitrary arbitrary again in doing construction minimarket. Cimahi Government did change some of the provisions in Regulation 1 of 2010 into regulation number 8 of 2016, the radius distance is still valid, but added the new policy is based on a quota of population is one minimarket per 6000 inhabitants.

Keywords: Policy Implementation, Minimarket Licensing, DPMPSTP Data